

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial negara bangsa. Ia bertujuan untuk mencetak manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri dan lain sebagainya (Soedijarto, 2008: 117).

Menurut Hasbullah (2006: 109), "sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai sepenuhnya". Salah satu ciri organisasi sekolah yang baik adalah pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya secara merata dengan baik, sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan.

Kebutuhan di sekolah meliputi sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga

pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar.

Dalam menjalankan kewajibannya, guru membutuhkan dukungan fasilitas. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah sebagai sarana dan prasarana umum pada sebuah lembaga pendidikan.

Setiap negara dalam hal penyelenggaraan pendidikan nasional mempunyai sistem yang berbeda-beda. Perbedaan itu sangat kuat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat nasional suatu negara. Sistem sosial berfungsi sebagai landasan ekologis bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan sistem budaya menjadi landasan idiil penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana dan sumber belajar. Menurut Mulyasa (2009: 193), banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah

keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Dari sekian banyak sumber daya pendidikan yang dianggap penting adalah uang. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar membantu pencapaian tujuan pendidikan (Abubakar dan Kurniatun, 2010: 255).

Menurut Hasbullah (2006: 25), dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional masih rendah karena dana yang tidak mencukupi. Dari bangsa-bangsa yang maju, mereka berani menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluan-keperluan yang lain.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktivitas sekolah (intra dan ekstra) dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 46 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Asmani (2009: 59-60), pemerintah mempunyai kewajiban memberikan alokasi anggaran yang

memadai untuk melengkapi sarana pembelajaran. Perbedaan mencolok antara lembaga pendidikan di kota-kota besar dengan lembaga pendidikan di pedesaan. Lembaga pendidikan di pedesaan memiliki sarana dan fasilitas minim: gedung tidak representatif, tidak mempunyai laboratorium, tempat praktik tidak ada, tempat olah raga tidak ada, dan lain sebagainya.

Realisasi dari pendanaan pendidikan tersebut adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak tahun 2005. Jumlah dana BOS yang diterima masing-masing sekolah sesuai dengan jumlah siswanya.

BOS adalah dana dari Pemerintah Pusat yang didistribusikan melalui Pemerintah Daerah ke SMP/MTs yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui BOS, Pemerintah Pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

SMP Negeri 1 Simo, Boyolali merupakan salah satu sekolah yang menerima dana BOS. Sekolah dengan status Sekolah Standar Nasional (SSN) dan berakreditasi A tersebut mempunyai jumlah murid mencapai 720 anak atau rata-rata sebanyak 40 anak/kelas. Pengelolaan dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan dengan optimal. Hasilnya adalah prestasi SMP Negeri 1 Simo, Boyolali yang tergolong baik di Kabupaten Boyolali. Pada Tahun Pelajaran 2010/2011, SMP Negeri 1 Simo, Boyolali berhasil mencapai peringkat tiga besar SMP dan sederajat dalam Ujian Nasional.

Menurut Kholis (2009: 72), pengelolaan bidang usaha dan keuangan lembaga pendidikan memerlukan pengawasan. Memonitor keuangan yang baik mengharuskan laporan-laporan keuangan yang disimpan dengan baik. Sedangkan Mulyono (2009: 180) kegiatan pengelolaan dana memerlukan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengarahan, kontrol, komunikasi dan bahkan juga ketatausahaan.

Kemampuan tim manajemen dana BOS di SMP Negeri 1 Simo, Boyolali ini tergolong bagus karena mampu menggunakan dana BOS dengan tepat sasaran dan berhasil meningkatkan mutu pendidikan. Pengelolaan dana BOS dimulai dengan perencanaan bersama dengan menentukan tujuan penggunaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS benar-benar mengacu pada panduan petunjuk teknis dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS.

Untuk pencairan dana BOS tahun 2011 mengalami perubahan mekanisme penyaluran yang semula melalui skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, dan penyaluran ke sekolah penerima mengikuti mekanisme APBD pemerintah kabupaten, tetapi obyek penelitian ini hanya meneliti dalam lingkup sekolah atau setelah dana diterima oleh sekolah dalam hal ini SMP Negeri 1 Simo Boyolali.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, yang menjadi fokus, penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo?” Peneliti membagi fokus penelitian menjadi tiga subfokus sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik perencanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2011?
2. Bagaimana karakteristik pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2011?
3. Bagaimana karakteristik pelaporan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan perencanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2011.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2011.
3. Mendeskripsikan pelaporan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Simo dalam mekanisme APBD Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan BOS.
 - b) Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan BOS.

2. Secara Praktis

- a) Memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada para pengelola pendidikan pada umumnya dan kepala sekolah pada khususnya, yaitu sebagai bahan acuan pengelolaan BOS.
- b) Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan oleh pengelola pendidikan tentang pengelolaan BOS.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah tindakan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program/kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

2. BOS

BOS adalah bantuan finansial yang diberikan pemerintah kepada sekolah setingkat SD/SMP dan sederajat untuk mendukung kegiatan pendidikan.